PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN STANDARDISASI BIDANG PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

Development of Policies on the Implementation of Standardization in the Aeronautical and Space Fields

Amy Reimessa, Hogan Eighfansyah Susilo, dan Adhi Pratomo

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Jalan Pemuda Pemuda Persil No.1, Rawamangun, Jakarta Timur
e-mail: amy.reimessa@lapan.go.id

Abstrak

Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa menjadi dasar hukum dalam pengembangan Kebijakan pelaksanaan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa. Seiring dengan berjalannya proses pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang penerbangan dan antariksa, dan adanya penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, serta perubahan pedoman standardisasi nasional yang ditetapkan oleh BSN, maka Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Pusispan) merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap substansi yang diatur dalam Perka Standardisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dan studi literatur. Tipe deskriptif yang dimaksud fokus pada penjelasan masing-masing sub teori terkait pengembangan kebijakan pelaksanaan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa, yaitu identifikasi masalah dan agenda seting, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Dari hasil kajian diperlukan adanya kebijakan pengembangan standar berupa petunjuk teknis operasional yang lebih spesifik dan dilakukan penyesuaian terhadap peraturan ataupun pedoman tentang standardisasi nasional yang mengatur pelaksanaan, penetapan, penerapan serta pengawasan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa.

Kata kunci: kebijakan, standardisasi, lapan, standar nasional indonesia (sni), penerbangan dan antariksa.

Abstract

The formulation of the policy outlined in Perka LAPAN No. 10 of 2017 on the Implementation of the Standardization Aeronautics and Space. Along with the process of developing the Indonesian National Standard (SNI) in the field of Aeronautics and Space, and the stipulation of PP Number 34 of 2018 regarding the Standardization System and National Conformity Assessment, as well as changes in national standardization guidelines set by BSN, the Center for Innovation and Aeronautics and Space Standards (Pusispan) feels it is necessary to make changes to the substances regulated in Perka Standardization.

This research was conducted using qualitative research methods with descriptive type and literature study. The descriptive type in question focuses on the explanation of each sub-theory related to the development of policies on the implementation of standardization in the field of aeronautics and space, namely problem identification and setting agenda, formulation, adoption, implementation and evaluation of policies.

The results of the study, it is necessary to have a standard development policy in the form of more specific operational technical guidelines and adjustments to the regulations or guidelines on national standardization that govern the implementation, determination, application and supervision of aeronautics and space standardization.

Keywords: policy, standardization, lapan, indonesian national standards (sni), aeronautics and space.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Standar dalam perekonomian memiliki peranan yang sangat krusial. Standar memiliki nilai strategis karena dapat membawa manfaat teknologi, ekonomi dan sosial. Dengan penetapan standar dapat membantu untuk penyelarasan spesifikasi teknis atas suatu produk, jasa, proses, metode, maupun personal

sehingga mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing. Kesesuaian sebuah produk terstandar membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, terjamin dan baik untuk lingkungan.

Industri nasional (Herjanto, 2011:122) hingga saat ini telah mampu memproduksi berbagai jenis produk sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri maupun luar negeri. Industri

nasional bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat tetap harus memacu diri untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. Peranan mutu menjadi sangat penting dan akan sangat menonjol di masa depan karena keterkaitan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian global akan semakin kuat, yang dengan sendirinya menuntut untuk mengikuti dan mematuhi standar internasional dan persyaratan masing-masing negara. Untuk mencegah masuknya produk-produk yang bermutu rendah, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi teknis dengan memberlakukan penerapan beberapa SNI secara wajib, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna sekaligus perlindungan terhadap eksistensi industri dalam negeri.

Standardisasi merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan sekaligus produsen dalam negeri. Standardisasi dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak memiliki mutu secara standar di pasar domestik, khususnya yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan kata kunci dari penetapan dan penerapan standar sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (UU Keantariksaan). UU Keantariksaan Pasal 51 ayat 2 menyatakan “Untuk menjamin keamanan Penyelenggaraan Keantariksaan, setiap Penyelenggara Keantariksaan wajib memenuhi standar dan prosedur keamanan”. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan bahwa Lembaga wajib mengawasi kepatuhan pemenuhan standar dan prosedur keamanan yang dilaksanakan oleh setiap Penyelenggara Keantariksaan. Sementara Pasal 52 ayat 1 menegaskan “Setiap Penyelenggaraan Keantariksaan wajib dilaksanakan dengan mematuhi standar keselamatan”.

Untuk memenuhi amanat UU Keantariksaan terkait standar, dalam penyelenggaraan keantariksaan maka diperlukan kebijakan dalam pelaksanaan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan keantariksaan.

Untuk menjalankan amanat Undang-Undang dalam memenuhi standar sebagai kewajiban penyelenggaraan keantariksaan,

LAPAN menetapkan Peraturan Lembaga yang menjadi landasan kebijakan dalam pelaksanaan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa yaitu Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standardisasi Bidang Penerbangan dan Antariksa (Perka Standardisasi). Perla Standardisasi disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional serta Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kebijakan tersebut mengatur kegiatan penyelenggaraan standarsisasi penerbangan dan antariksa, serta mengarahkan dan mengkoordinasikan program serta pengembangan standardisasi penerbangan dan antariksa yang tanggap terhadap kebutuhan nasional. Lebih rinci, Perka Standardisasi ini mengatur pelaksanaan standardisasi mulai tahap identifikasi kebutuhan standar hingga pengawasan dan kaji ulang standar baik Standar LAPAN (SL) maupun Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kebijakan ini juga menjadi acuan bagi pelaksanaan penilaian kesesuaian agar dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan standar yang tertelusur secara nasional maupun internasional, sehingga bisa memenuhi jaminan mutu dan keamanan produk, sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan terhadap mutu produk penelitian dan pengembangan LAPAN.

Setelah Perka Standardisasi diimplementasikan semenjak tahun 2017 hingga saat ini, terdapat beberapa aspek kebijakan pelaksanaan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa yang kurang relevan dengan perkembangan peraturan terkait standardisasi yang berlaku nasional, sehingga kebijakan pelaksanaan standardisasi bidang penerbangan dan antariksa perlu dilakukan pengembangan dan penyesuaian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar, berdasarkan ISO IEC Guide 2: 2008 merupakan dokumen persyaratan teknis termasuk tatacara dan metode yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan IPTEK dan pengalaman untuk memperoleh manfaat yang optimum. Sementara proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, mengawasi dan kaji ulang standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku

Kepentingan merupakan pengertian dari Standardisasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan sebagai pedoman nasional, serta ditetapkannya visi dan misi dalam Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 – 2040 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017, yaitu mewujudkan Penyelenggaraan Keantariksaan yang mandiri, maju, dan berkelanjutan dengan bercirikan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan yang sejajar dan sederajat dengan negara maju, mampu bersaing, berkembangnya sektor industri dan jasa keantariksaan, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terjaminnya keamanan umat manusia, terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka penyelenggara keantariksaan dituntut agar mampu menyediakan personal, proses, barang, dan jasa keantariksaan yang bermutu dan berdaya saing, dengan tujuan untuk memperluas kesempatan berusaha dan mendorong kegiatan komersialisasi keantariksaan di Indonesia.

Adanya tuntutan untuk menyediakan personal, proses, barang, dan jasa keantariksaan yang bermutu dan berdaya saing dalam penyelenggaraan keantariksaan, maka menetapkan standardisasi dalam penyelenggaraan keantariksaan menjadi penting. Untuk melaksanakan pengendalian dan pengaturan penyelenggaraan keantariksaan tersebut, diperlukan suatu kebijakan pengembangan standar yang mencakup aspek perumusan dan penetapan standar, aspek penerapan standar, dan penilaian kesesuaian.

Standardisasi (BSN, 2014:14) juga dinamis menyesuaikan dengan perkembangan global sehingga tujuan standardisasi menjadi sangat beragam sesuai dengan persoalan yang ingin diatasi. Dalam buku *Role of standards: A guide for small and medium-sized enterprises* (2006), yang diterbitkan oleh United Nations Industrial Development Organization, dirumuskan sepuluh tujuan standardisasi, meliputi:

- a) Kesesuaian pada tujuan (*fitness for purpose*);
- b) Mampu tukar (*interchangeability*);
- c) Pengendalian keanekaragaman (*variety reduction*);
- d) Kompatibilitas (*compatibility*);
- e) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya;
- f) Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik;

- g) Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan;
- h) Pelestarian lingkungan;
- i) Alih teknologi; dan
- j) Mengurangi hambatan perdagangan.

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (Islamy, 2009:18) mengartikan kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Sementara Carl Friedrich (Y. Kadji, 2015:9) mengatakan bahwa: "Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Pendapat Taufiqurakhman (2014:2) juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Begitu pula yang dijelaskan Wahab (2004:5) bahwa Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: Kebijakan Publik memiliki tujuan tertentu, berisi tindakan-tindakan pemerintah, merupakan hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, bisa bersifat positif (tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), Kebijakan Publik dalam arti positif setidaknya-tidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Sedangkan implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2008:145) adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Disamping itu, salah satu definisi implementasi kebijakan yang paling berpengaruh dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier (Michael Hill & Peter Hupe, 2002:6) yaitu Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang tetapi juga dapat berbentuk perintah penting eksekutif atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan itu ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang akan terjadi, menetapkan tujuan yang harus dicapai, dan struktur proses implementasi dalam berbagai cara. Proses biasanya melalui sejumlah tahap yang dimulai dengan undang-undang dasar, diikuti oleh keluaran kebijakan (keputusan) lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran dengan keputusan itu, dampak aktual - baik yang dimaksudkan maupun yang tidak disengaja - dari output tersebut, dampak yang dirasakan dari keputusan agensi, dan akhirnya, revisi penting (atau upaya revisi) dalam undang-undang dasar.

Handoyo (2012:96) mengungkapkan implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Kebijakan pengembangan standardisasi dalam penyelenggaraan keantariksaan adalah suatu konsep untuk mewujudkan pengakuan internasional atas sistem penyelenggaraan keantariksaan nasional yang melindungi kehidupan dan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan, serta mendorong kemajuan iptek, industri, dan pembangunan ekonomi.

dan antariksa, telah memetakan empat titik fokus kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan standardisasi penerbangan dan antariksa sebagaimana tertuang pada Gambar 1.

Seiring telah berjalannya proses pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Penerbangan dan Antariksa, Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Pusispan) merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap substansi yang diatur dalam Perka Standardisasi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan adanya petunjuk teknis operasional yang lebih spesifik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, serta perubahan pedoman standardisasi nasional yang ditetapkan oleh BSN, seperti telah ditetapkan Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia sebagai pengganti dari Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia. Pembahasan pengembangan kebijakan pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa dianalisis dan dideskripsikan menggunakan teori proses kebijakan James Anderson. Menurut Anderson (2003: 27-28) proses kebijakan terdiri dari :

a) Identifikasi masalah dan agenda seting (*problem identification dan agenda setting*)

Fokusnya di sini adalah bagaimana masalah yang dapat menjadi target kebijakan publik diidentifikasi dan ditentukan. Mengapa

Gambar 1. Titik fokus kebijakan pengembangan standardisasi

Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Pusispan) sebagai satuan organisasi setingkat eselon II pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan koordinasi penyusunan standar di bidang penerbangan dan antariksa, serta menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi perumusan standar, sertifikasi, dan akreditasi di bidang penerbangan

hanya beberapa masalah, dari semua yang ada, yang dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan memerlukan pemeriksaan pengaturan agenda; yaitu, bagaimana badan pemerintah memutuskan masalah apa yang harus diatasi. Apa itu masalah publik? Mengapa beberapa kondisi atau masalah menjadi masalah publik? Bagaimana masalah masuk dalam agenda pemerintah? Mengapa beberapa masalah tidak mencapai status agenda?.

b) Formulasi (*formulation*)

Ini mencakup penciptaan, identifikasi, atau peminjaman tindakan yang diusulkan, yang sering disebut alternatif atau opsi, untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah publik. Siapa yang berpartisipasi dalam perumusan kebijakan? Bagaimana alternatif untuk menangani masalah dikembangkan? Apakah ada kesulitan dan bias dalam merumuskan proposal kebijakan?.

c) Penentuan (*adoption*)

Ini melibatkan memutuskan alternatif yang diusulkan, termasuk tidak mengambil tindakan, akan digunakan untuk menangani masalah. Bagaimana alternatif kebijakan diadopsi atau diberlakukan? Persyaratan apa yang harus dipenuhi? Siapa pengadopsi? Apa isi dari kebijakan yang diadopsi?

d) Implementasi (*implementation*)

Di sini fokus perhatian pada apa yang dilakukan untuk menjalankan atau menerapkan kebijakan yang diadopsi. Seringkali pengembangan lebih lanjut atau penjabaran kebijakan akan terjadi dalam proses administrasi mereka. Siapa yang terlibat? Apa, jika ada, yang dilakukan untuk menegakkan atau menerapkan kebijakan? Bagaimana implementasi membantu membentuk atau menentukan konten kebijakan?

e) Evaluasi (*evaluation*)

Ini memerlukan kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan apa yang dicapai suatu kebijakan, apakah itu mencapai tujuannya, dan apakah ia memiliki konsekuensi lain. Siapa yang terlibat? Siapa yang diuntungkan dan diuntungkan oleh suatu kebijakan?

Tabel 1. Proses Kebijakan

	<i>Definition</i>	<i>Common sense</i>
<i>Stage 1: Policy Agenda</i>	<i>Those problems, among many, that receive the serious attention of public officials</i>	<i>Getting the government to consider action on the problem</i>
<i>Stage 2: Policy formulation</i>	<i>Development of pertinent and acceptable propouse courses of action for dealing with a public problem</i>	<i>What is proposed to be done about the problem</i>
<i>Stage 3: Policy Adoption</i>	<i>Development of support a specific proposal so that a policy can be legitimized or authorized</i>	<i>Getting the government to accept a particular solution to the problem</i>
<i>Stage 4: Policy Implementa-tion</i>	<i>Aplication of the policy by the government's administative machinery</i>	<i>Applying the government' s policy to the problem</i>
<i>Stage 5: Policy Evaluation</i>	<i>Effort by the government to determine whether the policy was effective and why or why not</i>	<i>Did the policy work?</i>

Sumber: James E. Anderson, 2003:28)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Metodologi kualitatif (Steven J. Taylor, dkk, 2016:7) mengacu dalam arti luas untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau narasi tertulis berdasarkan pengamatan terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan standarisasi bidang penerbangan dan antariksa serta membandingkan dengan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan standarisasi secara nasional.

Tipe deskriptif yang dimaksud fokus pada penjelasan pada masing-masing sub teori terkait pengembangan kebijakan pelaksanaan standarisasi bidang penerbangan dan antariksa yaitu identifikasi masalah dan agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Disamping itu, analisis juga diperkuat melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan menggunakan referensi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan standarisasi. Melalui studi literatur, hasil analisis pengembangan kebijakan pelaksanaan standarisasi bidang penerbangan dan antariksa dapat disajikan lebih komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi masalah dan agenda setting (*problem identification dan agenda setting*)

Fokusnya di sini adalah bagaimana masalah yang dapat menjadi target kebijakan publik diidentifikasi dan ditentukan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan memberikan kewenangan kepada LAPAN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penetapan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kegiatan keantariksaan, dapat dipandang sebagai modal yang harus digunakan oleh Puspispan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun disisi lain terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Penetapan dan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, serta Peraturan Badan Standarisasi Nasional tentang Pedoman Standarisasi Nasional yang ditetapkan oleh BSN mendorong perlunya penyesuaian substansi yang diatur dalam Perka Standarisasi;

2. Kebutuhan Peraturan LAPAN yang mengatur tata cara pelaksanaan standarisasi penerbangan dan antariksa.

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui terdapat dua permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan standarisasi bidang penerbangan dan antariksa. Kedua permasalahan tersebut difasilitasi oleh Puspispan sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan standarisasi penerbangan dan antariksa dengan melakukan perubahan terhadap Perka Standarisasi sesuai dengan PP 34 Tahun 2018 serta perubahan pedoman standarisasi nasional yang ditetapkan oleh BSN. Lebih lanjut, dilakukan perumusan terhadap Peraturan LAPAN tentang tata cara pelaksanaan standarisasi penerbangan dan antariksa.

4.2 Formulasi (*formulation*)

Formulasi kebijakan tersebut diuraikan ke dalam Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standarisasi Penerbangan dan Antariksa (Perka Standarisasi) yang ditetapkan pada 12 Oktober 2017. Perka Standarisasi tersebut memuat kebijakan dan tata cara serta ketentuan kelembagaan standarisasi, perumusan dan penetapan standar, penerapan dan penilaian kesesuaian, pembinaan dan pengawasan, pengkajian dan evaluasi standar, serta kerjasama standarisasi.

a) Aspek Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan standarisasi bidang penerbangan dan antariksa, struktur kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Perka Standarisasi terdiri dari: (1) Komite Standar LAPAN (KSL); (2) Komisi Teknis Perumusan SNI (Komtek SNI); (3) Sekretariat Perumus Standar; (4) Tim Perumus Standarisasi LAPAN (TPSL); dan (5) Tim Penyusunan Rancangan Standar (TPRS). Tugas, fungsi serta mekanisme dari masing-masing lembaga tersebut tercantum pada Pasal 4 hingga Pasal 9, serta Pasal 11 hingga Pasal 14 Perka Standarisasi.

Namun berdasarkan evaluasi implementasi Perka Standarisasi, pada 2018, PPSL ditetapkan setelah pengajuan usulan RSNI untuk ditetapkan menjadi PNPS oleh BSN, serta sebelumnya dilakukan verifikasi yang dapat menunjuk tenaga ahli dari dalam dan/atau luar negeri oleh Sekretariat seperti yang tercantum Pasal 12 ayat (4) hingga ayat (6) dan mendapatkan rekomendasi dari Komtek SNI melalui mekanisme Rapat Pembahasan Usulan PNPS. Kemudian pengajuan penetapan sebagai PPSL, diusulkan oleh Puspispan selaku Sekretariat Perumusan Standar.

Dengan demikian fungsi KSL dalam pelaksanaan verifikasi usulan Rancangan Standar telah dilaksanakan oleh Sekretariat Perumus Standar, serta fungsi memberikan rekomendasi dalam menetapkan PNPS maupun PPSL dapat dilaksanakan oleh Komtek SNI, sehingga diusulkan untuk meniadakan KSL dalam Struktur Kelembagaan Perumus Rancangan Standar Penerbangan dan Antariksa, sehingga susunan Kelembagaan menjadi: (1) Komite Teknis Perumus SNI (Komtek SNI); (2) Tim Perumus Standar LAPAN (TPSL); (3) Sekretariat Perumus Standar; dan (4) Tim Penyusun Rancangan Standar (TPRS).

b) Aspek Tahapan Perumus Standar

Pada Pasal 10 Perka Standardisasi menyebutkan, perumus standar dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Penetapan Program Pengembangan Standar; (2) Penyusunan Rancangan Standar; dan (3) Perumus Standar. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan perumus yang telah dilaksanakan pada 2018 - 2019, diketahui bahwa dalam rangka pengajuan usulan rancangan standar harus dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan standar penyelenggara keantariksaan, sehingga diusulkan perubahan tahapan perumus standar menjadi: (1) Identifikasi kebutuhan standar; (2) Pengajuan usulan rancangan standar; (3) Penetapan Program Pengembangan Standar Lembaga (PPSL); serta (4) Perumus standar.

c) Analisis Pelaksanaan Perumus Standar

Sebagaimana struktur kelembagaan, skema dan mekanisme perumus, serta produk rancangan standar penerbangan antariksa, terdapat dua proses yang berbeda yang memisahkan antara Standar LAPAN (SL) dengan SNI, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih detail dan diperlukan peraturan yang berisikan petunjuk teknis pelaksanaan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, yang menjelaskan kebijakan umum tentang perumus standar, sedangkan detail pelaksanaan diatur dalam PBSN No.3/2018 tentang Pedoman Pengembangan SNI.

Dengan kedua pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan pada Pasal 14 Perka Standardisasi yang mengatur tentang proses perumus dan penetapan standar. Dikarenakan ada perubahan Pasal 14, maka untuk menjelaskan proses selanjutnya, ditambahkan klausul pada usulan perubahan

Perka Standardisasi yang memberikan amanat untuk disusunnya Peraturan Lembaga tentang Tata Cara Perumus Standar. Dengan adanya Rancangan Peraturan Lembaga tentang Tata Cara Perumus Standar tersebut, maka mekanisme maupun panduan pelaksanaan perumus SNI maupun SL secara detail diatur dan ditetapkan.

d) Aspek Penerapan

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, bahwa penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan dan dapat diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pelaksanaan perumus standar penerbangan dan antariksa, sebagaimana diatur pada Bab Perumus dan Penetapan Standar, menghasilkan dua jenis standar, yaitu SNI dan SL. Perbedaan antara dua jenis standar tersebut dapat dilihat dari ruang lingkup pemberlakuan standar. Dengan demikian pada aspek penerapan yang diatur dalam Perka Standardisasi meliputi penerapan SL untuk lingkup LAPAN dan SNI bidang penerbangan dan antariksa untuk lingkup nasional.

Selain itu, Perka Standardisasi menyatakan bahwa pemberlakuan bagi SL bersifat wajib, sementara penerapan SNI bersifat sukarela atau bersifat wajib yang ketentuan kedua pilihan penerapan tersebut ditetapkan oleh Kepala LAPAN. Pada pasal berikutnya, dinyatakan bahwa untuk kepentingan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan penerbangan dan antariksa, Kepala LAPAN berwenang menetapkan pemberlakuan secara wajib dengan Peraturan Kepala.

Namun merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa prinsip dasar penerapan SNI ketika ditetapkan oleh BSN adalah bersifat sukarela. Melihat kembali pada Pasal 15 ayat (4) Perka Standardisasi, bahwa ketentuan penerapan sukarela atau wajib terhadap SNI bidang penerbangan dan antariksa ditetapkan oleh Kepala LAPAN. Jika diperbandingkan dengan prinsip dasar penerapan SNI serta kewenangan dalam penetapan SNI secara nasional, maka Pasal 15 ayat (4) Perka Standardisasi "bertentangan" dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018

tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional terkait dengan penetapan ketentuan SNI sukarela.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diusulkan perubahan Perka Standardisasi pada bagian pertama Bab IV tentang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

e) Aspek Penilaian Kesesuaian

Pada aspek penilaian kesesuaian tidak diusulkan perubahan yang bersifat substantif, hanya menambahkan klausul yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan dan penilaian kesesuaian akan diatur dalam peraturan Lembaga.

f) Aspek Pengawasan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional tidak mengatur tentang pengawasan terhadap penerapan standar, mengingat pengawasan standar dilaksanakan terhadap penerapan SNI yang bersifat wajib, dan pemberlakuan wajib ditetapkan oleh instansi teknis melalui Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Dengan demikian mekanisme pengawasan terhadap penerapan SNI yang bersifat wajib tersebut ditentukan oleh instansi teknis yang menetapkan.

Perka Standardisasi sendiri telah mengatur kebijakan tentang mekanisme pengawasan terhadap pemberlakuan SNI yang bersifat wajib, yaitu pada BAB V tentang Pembinaan dan Pengawasan. Dengan pertimbangan bahwa kebijakan mekanisme pengawasan masih relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan BSN, maka tidak dilakukan perubahan substantif. Namun memisahkan antara kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan, karena keduanya memiliki sifat dan ruang lingkup penerapan yang tidak terkait. Dikarenakan yang dimuat hanya garis-garis kebijakan pengawasan, maka diusulkan penambahan klausul tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang akan diatur dalam peraturan Lembaga.

g) Aspek Kaji Ulang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, serta Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia, kaji ulang SNI dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun setelah ditetapkan, dengan hasil berupa

menetapkan kembali SNI, mengubah SNI atau mengabolisi SNI.

Dalam Perka Standardisasi juga diatur tentang kebijakan kaji ulang standar penerbangan dan antariksa. Kaji ulang, menurut Perka Standardisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun atau sesuai kebutuhan. Dalam rangka kaji ulang SNI/SL dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi. Hasil kaji ulang dapat berupa revisi, tanpa perubahan atau usulan baru untuk SL/SNI.

Setelah dilakukan penelaahan, karena tidak ditemukan ketidaksesuaian antara Perka Standardisasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, serta Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia, maka tidak dilakukan perubahan substantif kebijakan tentang kaji ulang.

h) Aspek Kerjasama

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menyatakan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK). Sementara dalam Perka Standardisasi, kerjasama dilakukan dalam lingkup perumusan dan penerapan standar, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pada Perka Standardisasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan kerja sama dengan instansi lain. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam pengelompokan bab pembahasannya di dalam Perka tersebut, dimana aspek pembinaan dirangkaikan dengan aspek pengawasan. Setelah ditelaah tidak terdapat korelasi diantara keduanya, sehingga diusulkan perubahan dengan memisahkan antara aspek pembinaan dengan aspek pengawasan, dan merangkaiakan aspek pembinaan dengan aspek kerjasama.

Dengan dirangkaikannya, aspek pembinaan dengan aspek kerjasama, maka ruang lingkup yang akan diatur dalam kerjasama yang akan dirintis oleh LAPAN menjadi lebih terarah.

i) Aspek Lainnya

Aspek lain dalam Perka Standardisasi yang diusulkan untuk dilakukan perubahan yaitu aspek pembiayaan dan sanksi. Penghapusan aspek

tersebut diusulkan dengan mempertimbangkan pada saat penerapan SNI. Jenis sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk mencabut Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label yang dikeluarkan oleh Menteri dan/atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada pelaku usaha berdasarkan hasil pengawasan.

Dengan pertimbangan bahwa mekanisme pengenaan sanksi dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan penerapan SNI bidang penerbangan dan antariksa yang bersifat wajib, maka klausul sanksi akan dicantumkan dalam tata cara penerapan dan pengawasan standar penerbangan dan antariksa.

4.3 Penentuan (*adoption*)

Berdasarkan pada formulasi kebijakan, maka ditetapkan pengembangan kebijakan pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa sebagai berikut:

- a. Menyusun perubahan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa.
- b. Menyusun Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Cara Perumusan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- c. Menyusun Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Cara Penerapan Standar Penerbangan dan Antariksa.
- d. Menyusun Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Cara Pengawasan Standar Penerbangan dan Antariksa.

4.4 Implementasi (*implementation*)

Di sini fokus perhatian pada apa yang dilakukan untuk menjalankan atau menerapkan kebijakan yang diadopsi. Dalam implementasi Peraturan LAPAN tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa akan melibatkan Puspis sebagai koordinator pelaksana kegiatan Standardisasi, struktur kelembagaan dalam proses perumusan standar seperti Komtek SNI, Sekretariat Perumus Standar, TPSL dan TPRS, fasilitas litbangnya keantarksaan sebagai LPK, penyelenggara keantarksaan sebagai pengusul dan penerap standar, serta masyarakat umum yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan keantarksaan.

Dengan adanya Peraturan LAPAN tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa diharapkan terdapat tata cara dan

mekanisme yang jelas tentang perumusan dan penetapan standar, penerapan dan penilaian kesesuaian, pembinaan dan pengawasan, pengkajian dan evaluasi standar.

4.5 Evaluasi (*evaluation*)

Tahap ini dilaksanakan ketika implementasi kebijakan telah berjalan, seperti yang dilakukan pada saat diusulkannya perubahan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa.

5. KESIMPULAN

Seiring dengan berjalannya proses pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang penerbangan dan antariksa, dan adanya penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, serta perubahan pedoman standardisasi nasional yang ditetapkan oleh BSN, maka Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Puspis) merasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap substansi yang diatur dalam Perka Standardisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

Perkembangan pelaksanaan standardisasi penerbangan dan antariksa mengakibatkan dilakukannya perubahan terhadap Perka Standardisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut, sebagai efek dari perkembangan pelaksanaan standardisasi penerbangan dan antariksa dirumuskan Peraturan LAPAN tentang Tata cara pelaksanaan standardisasi penerbangan dan antariksa.

Perubahan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa diperlukan untuk menyelaraskan dengan Peraturan Perundang-Undangan Nasional tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Dari hasil kajian diperlukan adanya kebijakan pengembangan standar berupa petunjuk teknis operasional yang lebih spesifik dan dilakukan penyesuaian terhadap peraturan ataupun pedoman tentang standardisasi nasional yang mengatur pelaksanaan, penetapan, penerapan serta pengawasan standardisasi penerbangan dan antariksa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Manajemen Puncak LAPAN, Puspisan LAPAN dan pihak-pihak yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking. An Introduction*. Fifth Edition. Houghton Mifflin Company, Boston.
- Badan Standar Nasional. (2014). *Pengantar Standardisasi*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional, 2018, Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
- Badan Standardisasi Nasional, 2018, Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Herjanto, E. (2011). Pemberlakuan SNI Secara Wajib di Sektor Industri: Efektifitas dan Berbagai Aspek Dalam Penerapannya. *Journal of Industrial Research (Jurnal Riset Industri)*, 5(2).
- Hill, Michael & Peter Hupe. (2002). *Implementing Public Policy*. SAGE Publications.
- Islamy, Irfan. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- International Standard Organization, 2004, ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and Related Activities-General Vocabulary, ISO/TMBG Technical Management Board – groups.
- J. Taylor, Steven, Bogdan, R. & DeVault, M.L. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods* (fourth edition). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik. Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realita*. Gorontalo. Penerbit UNG Pres.
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2017, Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Standardisasi Penerbangan dan Antariksa, LAPAN, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2013, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Yang Mengatur Tentang Keantarksaan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 133. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 216. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 110. Sekretariat Negara.Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2017, Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1723, Sekretariat Negara. Jakarta.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.